

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

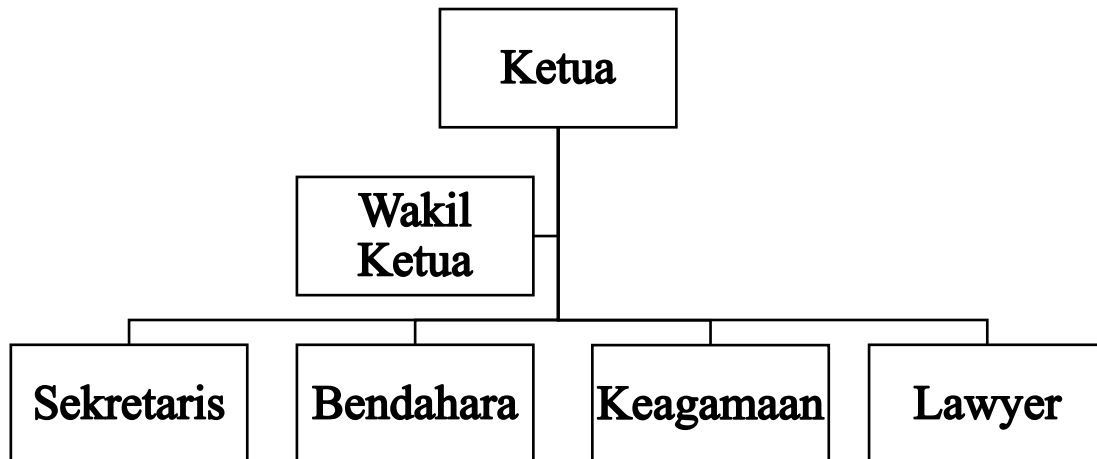
Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran tentang deskripsi lokasi yang akan diteliti, yakni lokasi kegiatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Probolinggo yang juga merupakan pusat kota dalam sekaligus tempat rekreasi. Banyak pedagang yang membuka lapak disana dan juga lokasi penelitian juga berdekatan dengan lokasi tempat penyelenggaraan bantuan dilakukan yaitu di Polres Kota Probolinggo. Dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan beberapa pedagang disana, ada sebagian pedagang yang juga ikut Komunitas Paguyuban Pedagang Kaki Lima.

1.1.1 Gambaran Umum Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PPKL)

Kota Probolinggo

Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PPKL) Kota Probolinggo adalah sebuah perkumpulan sosial para Pedagang dalam fungsi menjalin ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang erat dalam merintis usaha sebagai sesama pedagang. Perkumpulan yang sudah berdiri sejak 2001 ini bertujuan untuk menopang dan membantu para perintis usaha dalam berdagang dan bagi pedagang yang kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan usahanya.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PPKL



Sumber : Dokumentasi Wawancara Informan 5 Oktober 2022

Anggota yang berjumlah kurang lebih 700 pedagang diwajibkan aktif dalam berproses dalam organisasi PPKL ini dalam berbagai hal seperti pemberian bantuan, uang kas, bahkan juga harus ikut andil dalam berbagi pemikiran dan pendapat untuk meningkatkan kesejahteraan Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan ini.

Uang kas sendiri digunakan untuk kegiatan dalam paguyuban dalam mensejahterakan anggota dan membantu anggota yang kesulitan dalam ekonomi, juga pemberian bantuan bagi anggota paguyuban yang melahirkan secara Caesar, anggota yang sakit dan bila ada keluarga yang meninggal dunia

Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo juga beberapa kali menyelenggarakan acara sosial dalam agenda kegiatannya sebagai sebuah

paguyuban, diantaranya dalam santunan anak yatim, Gotong Royong Bersama sesama pedagang, Maulid Nabi dan lain sebagainya.

Dalam penerimaan bantuan, para anggota paguyuban juga menerima bantuan dari Polres Kota Probolinggo, dan rata-rata sudah menerima bantuan tersebut. Selain menerima, pihak Paguyuban juga membantu penyebaran informasi untuk beberapa PKL yang mungkin belum mendapatkan informasi terkait bantuan, maka dari itu pihak Polres juga kerja sama dengan Paguyuban dalam penyebaran informasi terkait Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung.

1.1.2 Gambaran Umum pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Bidang Seksi Keuangan (SIKEU) dibawah Koordinator Kapolres Probolinggo

Polres Kota Probolinggo merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Kota Probolinggo merupakan badan pelaksanaan kewilayahan dibawah kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Kota Probolinggo bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Probolinggo.

Polres Kota Probolinggo berlokasi di Jl. Dr. Moch Saleh no.34, kelurahan Sukabumi, kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur (Kepolisian Resor

Kota (Polresta) Probolinggo, n.d.). Wilayah hukum Polres Kota Probolinggo terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek) yang dibawahnya yakni ada 5 Polsek, dimana Polsek tersebut merupakan kesatuan Polisi yang berada pada wilayah kota. Polsek-Polsek yang dibawah oleh Polresta Probolinggo tersebut adalah:

- .1. Polsek Mayangan
- .2. Polsek Kademangan
- .3. Polsek Wonoasih
- .4. Polsek Sumberasih
- .5. PolsekWonomerto
- .6. Polsek Tongas

Keenam Polsek tersebut bertugas melaporkan kinerja kepada Polresta Probolinggo, selaku komando atau pimpinan wilayah hukum Kota Probolinggo (Prapto et al., 2019).

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia tentang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian sehingga dapat diciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bisa mencegah terjadinya kriminalitas yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Menurut G. Gewin memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan (Djoko Prakoso, 1987).

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat mutlak adalah rasa aman, tentram, dan tertib. Oleh sebab itu tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang mengancam jiwa, badan, harta, kehormatan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara.

Dalam Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dilakukan oleh bidang Seksi Keuangan (SIKEU) di dalam struktur Organisasi Polres Kota Probolinggo. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan (Perpol Nomor 2 Tahun 2021 SOTK Pada Tingkat Polres Dan Polsek, 2021).

Seksi Keuangan terdiri dari :

- a. Subseksi Gaji; bertugas melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri pada Polri.
- b. Subseksi Verifikasi; bertugas membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan
- c. Subseksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan.
- d. Urusan Administrasi bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan.

Seksi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi keuangan, meliputi

- b. pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
- c. pembayaran gaji pegawai negeri pada Polri; dan
- d. penyusunan laporan sistem akuntansi instansi serta pertanggungjawaban keuangan.

1.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam proses pengumpulan data akan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya . data yang diperoleh baik dari kegiatan observasi, wawancara maupun dokumentasi akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data dan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Dari keseluruhan informasi maupun data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak penyelenggara ataupun pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yakni kepala Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo, sebagai narasumber dalam penelitian ini. Lalu ada kasi keuangan sebagai narasumber dalam petugas kegiatan penyaluran bantuan di Polres Kota Probolinggo. Dan terakhir yaitu penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) sebagai narasumber tambahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo. Dalam melakukan analisis data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan menggunakan teori implementasi dalam fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya melalui beberapa indikator yang

terkait dengan implementasi yang akan digunakan oleh penulis sehingga analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dapat disajikan secara sistematis.

1.2.1 Implementasi Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Kota Probolinggo di Masa Pandemi Covid-19

Proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis implementasi program menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Sahya Anggra, 2014) menyatakan bahwa ada enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, disposisi.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

A Menurut (Van horn and Van Meter, 1975) identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan–tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu: pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan

yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Andika, selaku kepala Seksi Keuangan Polres Kota Probolinggo sekaligus sebagai pelaksana kegiatan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung atau disingkat BTPKLW ini merupakan bantuan tunai sebesar 1,2 juta yang diselenggarakan oleh presiden dengan memerintahkan Polri dan TNI dalam penyaluran dana tersebut. berdasarkan Kep Kapolri nomor 1414 tentang mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan program ini merupakan lanjutan dari bantuan bantuan yang sebelumnya pernah diselenggarakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), lalu Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan lainnya. Sedangkan bantuan BTPKLW ini adalah bantuan lanjutan yang menargetkan masyarakat dengan kondisi tertentu, yaitu memiliki sebuah usaha warung atau PKL saja” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari ucapan beliau diatas terkait sasaran kebijakan Yaitu terkait Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) hanya dikhususkan dan diberikan kepada warga yang memiliki usaha warung atau PKL. Selain masyarakat yang tidak memiliki warung atau PKL maka tidak termasuk dalam sasaran pemberian bantuan.

Terkait syarat dalam kebijakan tersebut, Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres menambahkan :

“Terkait dengan syarat dalam menerima bantuan. Ada beberapa ketentuan. Yaitu bantuan ini hanya diberikan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dari Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebelumnya. Lalu bantuan ini diberikan kepada wilayah/daerah yang melakukan penerapan PPKM level 4. Lalu yang pasti, penerima harus memiliki bukti usaha. Usaha apa yang dia punya, takutnya penerima ini tidak punya usaha, hanya ngikut orang saja. Berarti kan yang dia tidak

punya, si penerima ini karena dia hanya menjalankan usaha orang lain, atau atasannya. Jadi nanti juga wajib menyertakan foto usaha yang dimiliki juga. Dan juga tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah sebelumnya” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari wawancara diatas, terkait syarat penerima, peneliti menyimpulkan bahwa yang menerima bantuan hanya masyarakat yang memiliki usaha warung dan PKL. Dengan kondisi belum mendapat bantuan sebelumnya dari pemerintah dan berada di kota yang sudah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Level 4. Pemilik usaha juga diwajibkan memiliki bukti usaha yang sedang dijalankan.

Untuk ruang lingkup Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo ini, Bapak Andika sebagai Seksi Keuangan (Sikeu) Polres mengatakan:

“Untuk Polres kota di wilayah Polres kota, jadi di wilayah kota. Jadi yang mendapat bantuan dari Polres kota hanya masyarakat Kota Probolinggo saja yang mendapat. Walaupun kita ada 3 wilayah Polsek yang berada di wilayah Kabupaten, Tongas, Wonoasih , Wonomerto tapi mereka tidak masuk wilayah sasaran kita karena sasaran kita hanyalah di wilayah Kota Probolinggo” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari hasil wawancara perihal Ruang Lingkup penyebaran bantuan ini, Polres Kota Probolinggo hanya mencakup wilayah Kota Probolinggo saja yang mendapat bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik dan diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Dalam hal ini, sumber daya dapat terwujud sebagai sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial (Sahya Anggra, 2014).

a. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

1. Sumber Daya Pemberi Bantuan

Dalam implementasi program Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dilaksanakan oleh Polres Kota Probolinggo sudah didukung oleh sumber daya yang telah ditempatkan dalam pelaksanaan proses pemberian BTPKLW ini. sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Polres) Kota Probolinggo. Beliau menjelaskan:

“Terkait sumber daya manusia, pelaksana kita terdiri dari beberapa fungsi yang pertama selaku petugas pendata, itu adalah fungsi dari Babinkamtibnas, yang mereka berada di Polsek-Polsek. Mereka melakukan tugas untuk melakukan pendataan kepada calon penerima. Setelah Babinkamtibnas ini mendata, lalu dilakukan evaluasi atau penelitian oleh operator yang ada di fungsi keuangan (Sikeu). tapi selain melakukan pendataan dan evaluasi, Sikeu jugalah yang mengambil peran dalam pembagian bantuan BTPKLW tersebut.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Senada dari bapak andika selaku ketua Seksi keuangan (Sikeu) di Polres Kota Probolinggo, bapak Lukman yang bertugas dalam penyaluran sekaligus merupakan anggota Kasi Bendahara menambahkan:

“Untuk dana ini datang dari asops Kapolri yang merupakan bagian perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan, lalu di salurkan kepada wilayah tugas atau polda setempat melalui bidang keuangan yang mengurus alokasi dan pengolaan dana yang akan diberikan lalu diberikan kepada Polres yang merupakan pelaksana kebijakan tersebut” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

2. Sumber Daya Penerima Bantuan

Dari pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, diketahui dari lokasi penelitian, penerima bantuan yaitu hanya khusus pada Pedagang yang memiliki bukti usaha dengan menyertakan KTP, lalu gerobak atau lapak dagang dan berada dalam daerah yang menerapkan PPKM Level 4.

Dalam penerimaan bantuan, ada juga komunitas Paguyuban khusus Pedagang yang juga ikut andil dalam membantu proses pendaftaran dan menyiapkan persyaratan bagi calon penerima bantuan.

Berikut wawancara dari Ibu Eka selaku istri dari pendiri Bapak Munadi sebagai pendiri Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi buat anggota paguyuban tinggal datang dan membawa surat surat yang dibutuhkan buat daftar penerima. Meskipun yang ga ikut Paguyuban juga kami bantu dalam mengurus dokumennya. Tapi untuk anggota Paguyuban yang persyaratan sebagai penerima bantuan ga lengkap, kami juga bisa urus mas pake kartu paguyuban. Jadi bisa di negoisasi menggunakan kartu aktif keanggotaan itu” (Hasil Wawancara 5 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Andika Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) dan Bapak Lukman dari Bidang Keuangan (Bidkeu) diketahui bahwa ada beberapa sumber daya dalam penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini. Yatu dari Asops Kapolri yang bertugas pada bagian perencanaan kebijakan lalu disalurkan ke polda dan terakhir diberikan kepada Polres sebagai pelaksana pembagian dana Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Di Polres ada dua fungsi yang bergerak yaitu fungsi Babinkamtibnas sebagai tim pendataan para calon penerima

bantuan lalu dari Seksi Keuangan Polres sebagai tim penyalur bantuan kebijakan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW)

Dan juga dari Ibu Eka selaku bagian dari kepengurusan Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan Warung Kota Probolinggo (PPKL) mengatakan bahwa mereka memberikan informasi kepada anggota PPKL dan juga kepada pedagang yang bukan anggota dan membantu mengurus keperluan dan syarat penerima Bantuan Tersebut. Bagi pedagang yang tak memiliki atau memenuhi beberapa prasyarat bisa dibantu dalam mempersiapkan surat-surat dan persyaratan untuk menerima Bantuan. dan jika pedagang memiliki surat Keanggotaan Paguyuban yang bisa dipakai sebagai alat pertimbangan dalam mendapatkan bantuan. Kartu Keanggotaan ini berguna bagi pedagang yang tak memiliki atau tidak memenuhi beberapa persyaratan untuk penerima bantuan. Dengan kartu Paguyuban tersebut bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan.

b. Sumber Daya Finansial

Diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi

persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Berikutnya adalah sumber daya finansial. Bapak Andika menjelaskan:

“Anggaran ini bersumber dari anggaran pemerintah yang disalurkan melalui Mabes Polri. Jadi bertahap, ada tahapan dari pemerintah menyerahkan ke Mabes Polri, Mabes Polri menyerahkan ke polda, dan polda menyerahkan ke Polres. Dan nilai bantuan yang diserahkan itu sesuai dengan nominal yang ada dalam kebijakan tersebut. Sedangkan untuk biaya operasional dari kegiatan ini, biasanya kegiatan/program seperti ini ada biaya operasional tapi untuk btpklw ini tidak ada.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas, Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo mengatakan terkait Sumber Daya Finansial tidak ada, melainkan hanya dana untuk bantuan saja yang diberikan. Jadi untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dari pemerintah tidak ada dan merupakan tanggungan sendiri bagi Polres Kota Probolinggo.

c. Sumber Daya Waktu

Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Ketepatan waktu dalam implementasi

Untuk sumber daya waktu, bapak Andika ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo menyampaikan ;

“Kita diberikan target waktu. Saat itu diberikan target waktu sebelum hari raya. Kan kita dua kali ya, dua kali penyaluran bantuan. Yang pertama 2021 kemarin, yang kedua yaitu bantuan pedagang kaki lima dan warung minyak goreng atau BTPKLW Minyak goreng. 300 ribu nominalnya. Jadi ada dua, yang pertama 2021 itu satu juta dua ratus yang tunai. Lalu tiga ratus ribu juga tunai, yang minyak goreng. Nah yang kita bahas in ikan BTPKLW ya, untuk BTPKLW in ikan menyesuaikan dengan kep Kapolri yang turun di tanggal 6 september, kita akhir oktober tanggal 31 oktober itu sudah closing. Dengan keterbatasan personil, kita bertahap memberikan bantuannya. Total yang diberikann Polres probolinggo kota. Target itu adalah tiga ribu lima ratus orang. Dengan dana total 4,2 milyar total dananya. Itu sudah tersalurkan semua sampai dengan tanggal 30 oktober terakhir menyalurkan”. (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari penjelasan beliau diatas tentang sumber daya Waktu bahwasannya Polres memiliki *time limit* (batas waktu) yaitu dimulai dari turunnya sura perintah kep Kapolri yang turun dari Mabes Polri lalu dimulailah kegiatan pendataan dan penyaluran dari bulan September sampai dengan bulan oktober tanggal 30.

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Characteristics of The Implementing Agencies (Karakteristik agen pelaksana) menurut Van Metter yaitu characteristics, norms, and recurring patterns of relations inside the executive agencies that have either potential or actual relation to what they do in the way of policy. (Van Metter Van Horn, 1975:470). Berdasarkan pemaparan diatas, karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan

patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari: struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dianalogikan bahwa implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Cakupan atau luas wilayah dalam implementasi kebijakan pun perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan dengan karakteristik yang tepat pula.

Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan mengatakan bahwa:

“agen pelaksana dalam penyaluran BTPKLW hanya kita dari seksi keuangan yang menyalurkan BTPKLW ini. Karena memang kita diberi tanggung jawab untuk menyalurkan. Yang melakukan pendataan adalah Babin, yang menyalurkan adalah seksi keuangan, seksi keuangan juga ikut andil dalam memeriksa dan juga sudah kompeten dalam hal administrasi bantuan seperti ini” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dsini, pak Lukman selaku kasi bendahara dan petugas penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) juga menambahkan

“Kapolres dan Wakapolres juga ikut mengawasi jalannya penyaluran bantuan, ditambah juga. Kabag Ops yang mengatur pengawasan operasional dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Kasat Binmas juga bertugas dalam pemberian informasi di tempat penyaluran yaitu di aula Polres agar warga bisa mengerti prosedur bantuan dan proses yang terjadi di dalam penyaluran BTPKLW ini yang diharapkan bisa memudahkan masyarakat. dan untuk penyebaran informasi program BTPKLW ini kepada masyarakat, itu dilakukan oleh bhabinkamtibmas”. (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari penjelasan yang dipaparkan Bapak Andika selaku Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) dan Bapak Lukman selaku dari Kasi Keuangan diketahui bahwa Karakteristik dan kompetensi anggota pelaksana penyaluran merupakan hasil dari pimpinan Mabes Polri yang mengamanahkan bagian penyalur kepada staff Seksi Keuangan dan juga Babinkamtibnas selaku tim pendataan dimasyarakat mengingat keberadaan mereka bisa menyebar di setiap elemen masyarakat

Terkait badan pelaksana yang juga ikut turut andil di luar organisasi itu sendiri dalam dukungan badan lain seperti eksekutif dan legislative, bapak andika sebagai Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo mengatakan:

“Terkait dukungan tambahan badan legislatif dan eksekutif dalam penyaluran dana bantuan pedagang kaki lima dan warung ini tidak ada. Jadi kami bekerja sendiri dari anggota kepolisian” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Bapak Andika sebagai Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo mengatakan dalam badan pelaksana eksternal di luar Polres tidak ada dan hanya Polres bagian Seksi Keuangan (Sikeu) yang menjadi pelaksana penyalur Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung.

D. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-rujukan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuantujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

a. Komunikasi Antar Pelaksana

Bapak andika selaku ketua seksi keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo mengatakan terkait komunikasi dan penyebaran informasi:

“Penyebaran informasi awal itu dari perintah presiden langsung yang diberikan pada Kapolri dan panglima TNI untuk menyalurkan dana itu. Baru atas dasar perintah presiden itulah Kapolri menerbitkan Kep nomor 1414 itu tentang mekanisme bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung yang disalurkan oleh Polri dan TNI. Polri dibawah naungan dari as ops Mabes Polri, kita terstruktur atau berjenjang. Dari Mabes Kapolri menunjuk ke kasatgas atau kepala satuan tugasnya itu As Ops Kapolri. Setelah itu di wilayah Polres itu Kabag Ops sebagai kasatgas. Setelah terbit kap Kapolri itu kita membentuk tim dimana timnya adalah tim satuan tugas yang dipimpin oleh tadi itu yang berjenjang dari Mabes Polri, polda, dan Kapolres.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Hasil penelitian yang peneliti dapat, tentang komunikasi antar pelaksana dengan pembuat kebijakan. Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo, bahwasannya, komunikasi awal ini berurutan dari perintah presiden kepada Kapolri untuk menerbitkan surat perintah kebijakan yaitu Kep/1414/IX/2021 tentang Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Kasatgas di Mabes mengirimkan ke Polres melalui Kabag Ops dan dimulai lah penyaluran pada Polres Kota Probolinggo untuk penyaluran bantuan.

Untuk penyebaran informasi tambahan kepada masyarakat, pihak Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan

Kota Probolinggo juga ikut menyebarkan lewat informasi media sosial

b. Penyebaran Informasi

Setelah penjelasan terkait komunikasi antar pelaksana diatas, bapak andika selaku ketua seksi keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo juga menambahkan dalam komunikasi pendistribusiannya sebagai berikut;

“Nah untuk proses pendistribusiannya, ada yang namanya aplikasi. Jadi Mabes Polri sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk BTPKLW. Aplikasi ini tidak bisa diakses masyarakat. Ini hanya untuk petugas. Aplikasi itu digunakan untuk pendataan awal. Yang melakukan tugas pendataan itu adalah bhabinkamtibmas. Yaitu tugas untuk pendataan calon penerima. Bhabinkamtibmas akan melakukan pendataan awal. Di kep Kapolri itu sudah ada jelas siapa saja yang bisa masuk syarat dalam mendapatkan bantuan. Yang paling utama adalah pedagang kaki lima dan warung. Warung disini adalah warung makan. Jadi bhabinkamtibmas melakukan pendataan data awal kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dilakukan pendataan dengan cara menginput data pribadi seperti NIP, Tempat tanggal lahir, nama, alamat, jenis usaha dan tempat usahanya dimana. Setelah bhabinkamtibmas melakukan pendataan. Lalu di input kedalam aplikasi itu, puskeu presisi nama aplikasinya. Setelah di input semuanya, aplikasi ini terkoneksi dengan kementerian koperasi dan juga kementerian sosial. sehingga pada saat data itu di input oleh Babin, akan tersaring. Jadi data yang terinput akan diperiksa apakah sudah pernah mendapat bantuan dari kemenkop atau kemensos. Jika belum mendapatkan bantuan, maka data tersebut akan diterima jika sudah mendapat bantuan maka akan ditolak. Kalau dia sudah lolos verifikasi nanti akan diterbitkan surat perintah penetapan yang ditandatangani Kapolres masing masing. Surat perintah penetapan itu sudah mereka yang lolos verifikasi. Baru diterbitkan surat undangan kepada yang bersangkutan. Yang undangan itu harus diserahkan secara langsung oleh bhabinkamtibmas” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Lalu ibu Eka dari Kepengurusan Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo menambahkan :

“Untuk informasi bantuan buat PKL itu ya mas, kami ada grup wa, setiap ada info terkait bantuan langsung kami share lewat grup. Ada juga yang melalui rt/rw lalu kami sampaikan lewat grup wa”

Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo menjelaskan dalam menginformasikan kepada masyarakat, pihak Polres menggunakan sebuah aplikasi bernama Puskeu Presisi, yang dimana aplikasi ini hanya bisa di akses oleh pihak tertentu salah satunya Polres dan bukan untuk umum. Babinkamtibnas akan terjun ke lokasi dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui Ketua Rt/Rw untuk pendataan dan mensurvey langsung lokasi. Setelah didapatkan informasi, Babinkamtibnas akan menginput data tersebut melalui Puskeu Presisi yang terhubung langsung kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan akan di verifikasi disana. Jika sudah terverifikasi maka calon penerima yang sudah lolos data akan diberikan undangan yang dikirm langsung oleh Babinkamtibnas untuk melakukan pengambilan bantuan sosial di Polres Kota Probolinggo.

Untuk penyebaran informasi tambahan kepada masyarakat, pihak Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo juga ikut menyebarkan lewat informasi media sosial dan ada juga yang langsung menghampiri ke sesama pedagang di tempat atau lapak Pedagang tersebut.

E. Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal terakhir yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Disposisi adalah sikap atau watak dari pelaksana implementasi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, juga menjadi sebuah hal penting. Karena ini juga berpengaruh seberapa jauh suatu implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan. Sikap ini dapat berupa komitmen tinggi, kejujuran, ketelitian, demokratis, dan lain sebagainya. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat. (Anggara 2014, kebijakan publik)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

a. Kognisi/Pemahaman kebijakan

“Jadi tujuannya yaitu untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemic covid yang juga juga buat warung

makan dan pkl yang kesulitan saat diterapkan PPKM itu.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

b. Tanggapan Kebijakan:

“Kita sebagai pelaksana hanya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pimpinan yang dipercayakan kepada Polri untuk melakukan penyaluran, ya kita laksanakan sesuai tanggung jawab kita.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dalam pihak Polres sendiri sudah memahami terkait maksud dan tujuan kebijakan dilakukan yaitu agar masyarakat terbantu dengan adanya Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini dan pihak Polres dengan segenap hati melaksanakan apa yang sudah ditugaskan kepada mereka terkait penyaluran bantuan tunai senilai satu juta dua ratus ini kepada masyarakat yang dikhususkan pada pedagang kaki lima dan warung.

c. Kendala kebijakan:

“Kalau terkait dengan pekerjaan kita sudah melaksanakan dengan optimal, cuman.. untuk kendala ada kendala yaitu dari aplikasi dalam aplikasi Puskeu Presisi. Dimana aplikasi tersebut digunakan oleh semua anggota Mabes Polri atau seindonesia. Jadi sistemnya down, karena banyak yang make. Jaringan juga masuk dalam kendala tersebut. Jadi kebanyakan kendala itu dari aplikasi. Jadi kita tidak bisa mengerjakan atau menyalurkan jika aplikasinya ada gangguan. Mungkin karena aplikasinya masih baru mungkin. Jadi masih butuh beberapa update agar bisa optimal.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Hasil wawancara diatas diketahui dalam kendala pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan

Warung (BTPKLW) ini, bapak andika menuturkan bahwa kendalanya ada di dalam aplikasi Puskeu Presisi. Aplikasi yang digunakan untuk mensurvey masyarakat calon penerima bantuan. Terkait apakah masyarakat tersebut sudah layak dan memenuhi syarat dalam penerimaan atau tidak.

Senada dengan itu, bapak Lukman sekaligus bagian Bidang Keuangan mengatakan:

a. Kognisi/Pemahaman kebijakan

“Bantuan ini disalurkan guna memulihkan ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid 19 terutama para pedagang kaki lima yang usahanya juga menurun.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

b. Tanggapan kebijakan:

“Kami anggota Polres selalu siap terhadap apa yang diamanahkan kepada kami terutama dalam melayani masyarakat.” (Hasil Wawancara 27 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan Bersama Bapak Lukman Selaku Bidang Keuangan (Bidkeu) dan pelaksana penyalur Bantuan, peneliti menyimpulkan bahwa anggota Polres Sudah siap melaksanakan apapun yang sudah diperintahkan atasan kepada pihak Polres dan memahami seutuhnya maksud dan tujuan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini diselenggarakan.

F. Lingkungan, Sosial dan Politik

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut. (Sahya Anggra, 2014)

Dalam hal ini, lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi dalam implementasi Dalam hal ini, lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi dalam implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dilaksanakan oleh Polres Kota Probolinggo, Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Andika selaku Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

a. Lingkungan sosial

“masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Polri dan menurut observasi

kami, masyarakat sudah senang mengingat di waktu itu kondisi memang lagi parah akibat covid dan diterapkannya pphkm”

Hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sirad, selaku penjual Batagor di Alun alun Kota Probolinggo yang merupakan penerima Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Beliau mengatakan :

“ya lumayan terbantu dengan adanya uang bantuan ini. Pelayanannya juga sportif, bagus meskipun antriannya lama di Polres karena banyak yang dapat bantuan tapi pas nyampe di tempat. Enak ga panas karena di dalam Gedung mas enak. Tinggal nunggu Namanya dipanggil satu per satu”

Senada dengan Bapak Sirad, selanjutnya dari bapak Huda selaku penjual es cincau di alun alun Kota Probolinggo, beliau menambahkan:

“pihak Polres sudah bagus mas, maksimal pelayanannya. Cuma ya anu mas..apa.. yang dari yang dapat bantuan itu kadang kala nggrandol (berebut) pas pembagian itu mas. Itu yang membuat lama. Tapi dari Polres sendiri sudah tertata mas. Pas awal datang sudah dikumpulkan data datanya, ditumpuk dan nanti diambil lagi”.

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas adalah bahwa dalam lingkungan sosial, masyarakat sudah terbantu dan turut mendukung kegiatan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini karena dengan tersedianya tempat yang nyaman saat pembagian lalu petugas yang sudah semaksimal mungkin meminimalisir jika ada kendala yang

bahkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang datang saat itu untuk mengambil jatah bantuan dari pemerintah.

b. Ekonomi

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Andika selaku Ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo dalam masalah ekonomi di penerapan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), beliau mengatakan:

“Dari segi ekonomi, kalau dibilang cukup terkait dana yang daibagikan itu relative ya. Kalau menurut kita sudah cukup, tapi kalau menurut masyarakat mungkin kurang. Relative, kalo kita menanyakan apakah cukup ya.. kita bukan sebagai user atau kita bukan sebagai penerima, kita sebagai yang menyalurkan. tapi dari sudut pandang kita ini sudah cukup dan minimal itu bisa membantu meronhakkan beban ekonomi mereka”

Hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti dengan bapak Sirad penjual batagor ,beliau mengatakan:

“Ya ini mas buat beli bahan persediaan lagi buat jualan batagor. Beli minyak, minyak kan mahal waktu itu, sama tepung, tahu. Jadi kalo menurut saya uang bantuan itu ya..kalo cukup ya cukup..kalau kurang ya kurang hahaha.. soalnya ya kacangnya itu berapa, tepung juga sudah naik lagi, tepung dah naik dua ratus lima puluh, jualan tetep saya. Jadi ya uangnya saya buat ini lagi apa lagi, juga ya buat makan. Buat modal jadi ya lumayan terbantu lah.”

Menanggapi pertanyaan yang sama, bapak Huda penjual es cincau sebagai masyarakat yang mendapat Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), beliau mengatakan:

“fokus dana ini di buat usaha mas. Karena kan saya sendiri dengan keadaan covid seperti ini kan pendapatan mulai menurun jadi ya itu jaded dapat dari Polres saya buat ini belobahan bahan itu mas. Jadi saya kebanyakan buat modal usaha, kalau ada sisa ya buat makan mas. Kalau apakah ini cukup atau kurang ya bisa dibilang kurang mas, tapi kalau kita bersyukur ya alhamdulillah dah dengan adanya bantuan ini.”

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam segi ekonomi masyarakat merasa terbantu dengan adanya Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini karena dirasa datang disaat yang tepat saat pandemi Covid-19 dan masih merasa bersyukur meskipun ada dari beberapa mereka yang masih merasa kurang.

c. Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Andika selaku ketua Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo, sekaligus sebagai pelaksana kegiatan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), beliau mengatakan bahwa:

“Terkait bantuan dukungan dari pemerintah dan sebagainya, kita tidak ada selama ini dari pemerintah daerah. Kita juga tidak dapat bantuan atau dukungan. Hanya kita melakukan koordinasi dengan kodim. Karena apa.. kodim juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang juga sasarannya sama seperti kami dari Polres. Jadi kita bersinergi kita berkoordinasi dengan instansi kodim agar tidak terjadi duplikasi atau data ganda di Polres menerima, di kodim juga menerima. Jadi betul betul, bantuan ini diharapkan masyarakat bisa menerima semua bantuan secara merata”

Dari hasil wawancara diatas terkait lingkup Politik dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan

Warung (BTPKLW) tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Polres Kota Probolinggo hanya melakukan koordinasi dengan Kodim yang juga mendapat arahan dan perintah dari presiden untuk penyaluran Bantuan Tunai Pedagang kaki Lima dan Warung ini

1.3 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (2014, kebijakan publik) menyatakan bahwa ada enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, disposisi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dan Standar

Dalam implementasi kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah tujuan dan standar yang jelas. Menurutnya, suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di impelentasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan

dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. (Anggara 2014, kebijakan publik)

Dari dimensi standar dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu tujuan dari Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang tercantum dalam Kep/1414/IX/2021 mengenai Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor yang merupakan bantuan atas perintah presiden langsung yang bekerja sama dengan kementerian koperasi dan kementerian sosial yang diberikan kepada Polres sebagai penyalur kebijakan yang merupakan kebijakan lanjutan dari BPUM seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di wilayah kota PPKM level 4 yang terjangkit Virus Covid-19. Bantuan BTPKLW ini hanya berfokus pada masyarakat yang tinggal di Kota Probolinggo saja lalu juga masyarakat yang memiliki usaha berupa warung dan gerobak untuk berjualan. Dan dengan syarat tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sebelumnya lalu memiliki bukti usaha dan juga harus menyertakan menyertakan foto usaha.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari

keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), terdapat tiga unsur yang telah diketahui dari hasil penelitian sesuai dari teori Van Horn dan Van Meter. Pertama unsur Sumber Daya Manusia, Kedua Unsur Sumber Daya Finansial dan Ketiga yaitu Sumber Daya Waktu. dalam sumber daya manusia, ada dua fungsi yang bekerja sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Dua fungsi tersebut yaitu yaitu dari anggota Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo sebagai tim pelaksana evaluasi dan pendataan, sekaligus sebagai pelaksana pembagian bantuan kepada calon penerima yang dilaksanakan di Polres Kota Probolinggo. Lalu fungsi yang kedua yaitu dari anggota Babinkamtibnas sebagai fungsi pendataan calon penerima bantuan.

Dari Penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, diketahui dari lokasi penelitian, kebanyakan penerima bantuan merupakan masyarakat yang sudah berumur 40 tahun keatas dan mereka mempunyai

kartu bukti usaha Nomer Induk Berusaha (NIB), KTP, lalu juga daerah tersebut berada di PPKM level 4.

Disini juga ada dari peran Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo (PPKL) Paguyuban Pedagang ini juga turut membantu para pedagang yang merupakan anggota maupun yang bukan anggotanya juga dalam mengurus surat dan persyaratan calon penerima bantuan dikarenakan beberapa dari pedagang itu sangat awam dan kesulitan dalam mempersiapkan pra-syarat bantuan tersebut, apalagi untuk yang lanjut usia.

Untuk dana bantuan sendiri datang dari asops Kapolri yang merupakan pengawas dan pembantu pimpinan di markas besar Polri yang merupakan bawahan langsung dari Kapolri. Lalu disalurkan di polda oleh Bidang Keuangan yang di alokasikan pada Polres yang merupakan tempat penyaluran bantuan.

Di bagian anggaran dana operasional dalam penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dalam prosesnya tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Tanggungan dalam pelaksanaan acara sampai proses penyaluran itu dibiayai dan merupakan tanggungan untuk Polres masing-masing. Dana yg diberikan oleh pemerintah hanya dana bantuan untuk BTPKLW itu sendiri.

Terkait tenggat waktu. Polres Kota Probolinggo sudah memenuhi target dalam pembagian bantuan sosial yang pertama yaitu ditahun 2021 terkait Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dimulai awal pada tanggal 6 september mendapat surat

perintah dari Mabes Polri kepada Polres untuk melakukan pelaksanaan penyaluran bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Kota Probolinggo dengan sumber daya yang ada dari Babinkamtibnas dan juga Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo bergerak dalam pelaksanaannya dengan menyalurkan target penerima sebanyak tiga ribu lima ratus penerima bantuan dengan nilai bantuan per orangnya senilai satu juta dua ratus ribu rupiah dalam tenggat waktu yang dimulai dari tanggal 21 September sampai dengan 30 Oktober dengan total 13 gelombang dalam pembagiannya dikarenakan keterbatasan personil yang terlibat.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-inti dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan

di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif) 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), Polres Kota Probolinggo sebagai pelaksana kebijakan dari hal kompetensi sudah terjamin dan dipercayakan oleh Markas Besar Kepolisian untuk diserahkan kepada bidang Seksi Keuangan (Sikeu) dalam penyalurannya yang juga sekaligus merupakan operator dalam evaluasi dana di tempat penyaluran. Lalu ada Babinkamtibnas sebagai *survey crew* dalam pendataan awal di pada masyarakat calon penerima bantuan. Karena keberadaan Babinkamtibnas ini bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dengan tempat operasi mereka yang tersebar luas di kota dan sekitarnya.

Kapolres dan Wakapolres juga ikut mengawasi jalannya bantuan sebagai petinggi di instansi Polres Bersama dengan kasatbinmas selaku ahli dibidang kemasyarakatan dalam penyampaian informasi di tempat penyaluran agar masyarakat mudah mengerti terkait alur laju dan cara kerja penerimaan bantuan di Polres Kota Probolinggo.

Meskipun tidak ada sumber dukungan tambahan, pihak Polres Kota Probolinggo sudah semaksimal mungkin menjangkau dan membantu masyarakat Kota Probolinggo dengan menggunakan fungsi anggota yang ada. Terutama dalam penyebaran informasi dan pendataan yang merupakan peran penting yang diperankan oleh fungsi Babinkamtibnas. Dimana Babinkamtinas terjun langsung ke Masyarakat untuk melakukan *survey* dan membagikan undangan resmi kepada calon penerima manfaat bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung.

d. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar

pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. *Kedua*, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo terkait Komunikasi antar organisasi dan penyebaran informasi diketahui dalam pembuatan kebijakan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini merupakan dasar perintah dari presiden langsung yang diamanahkan kepada Polisi Resor (Polres) selaku tim pelaksana kebijakan melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi terkait Jaminan Sosial UMKM di masa Pandemi Covid-19 dan dana tersebut diberikan pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu Kapolri menurunkan Kep/1414/IX/2021 Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor.

Dalam proses pembagiannya kepada masyarakat. Pihak Polres menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Mabes Polri untuk pendataan dan penyaluran calon penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yaitu Puskeu Presisi. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh pihak kepolisian dan bukan untuk umum. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata calon penerima bantuan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas yang terjun langsung dalam penanganan data. Disini syarat bagi masyarakat yang untuk mendapatkan bantuan BTPKLW ini

yaitu belum mendapatkan bantuan dari pemerintah sebelumnya. Lalu memiliki bukti usaha. Menyertakan data diri seperti ktp, bukti dokumen usaha lalu daerah yang terkena PPKM level 4, alamat rumah, jenis usahanya seperti apa. Data yang sudah didapat dari masyarakat akan dikirim melalui aplikasi Puskeu presisi yang akan langsung terhubung kepada Kementerian Koperasi dan Kementrian Koperasi yang bertugas untuk men scanning data agar tidak ada kesalahan saat pembagian bantuan. Ditakutkan bahwa ada masyarakat yang sudah mendapat bantuan sebelumnya maka tugas kementerian koperasi dan kementerian sosial disini yang memvalidasi data. setelah data divalidasi atau di konfirmasi oleh kementrian koperasi dan kementerian sosial maka akan surat perintah penetapan di Kapolres masing masing lalu Babinkamtibnas akan mengirim surat undangan bagi calon penerima yang sudah lolos verifikasi dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial melalui aplikasi Puskeu Presisi.

Dalam masyarakat sendiri terutama dalam lingkup pedagang, penyebaran informasi juga didapatkan dari Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo yang membantu dalam menginformasikan masyarakat sesama pedagang dalam mengurus berbagai macam persyaratan untuk menerima bantuan tunai tersebut.

e. Sikap dan Kecenderungan para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui

persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo yang juga merupakan pelaksana kebijakan sudah memahami tujuan kebijakan ini dibuat oleh pemerintah yaitu tentang bantuan berupa tunai yang di khusus kan kepada warung dan pedagang kaki lima yang terkena dampak covid-19 dan masuk di dalam wilayah PPKM level 4. Dan sebagai pihak pelaksana, Polres Kota Probolinggo. Melaksanakan sesuai dengan apa yang ditugaskan pada mereka.

Terkait kendala yang dialami dalam proses penyaluran dana Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), pihak Polres Kota Probolinggo mengalami kendala dalam bagian teknis di aplikasi. dimana aplikasi aplikasi yang digunakan itu sering mengalami server down, akibat

banyak pengguna atau user yang menggunakan aplikasi yang terhubung kepada kementerian sosial dan kementerian koperasi tersebut. Sehingga membuat pendataan dan evaluasi dalam pembagian jadi sedikit terhambat

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam hal ini terdapat faktor Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi yang perlu di jelaskan dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini. dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Probolinggo sebagai tempat pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan, diketahui dari Dari factor lingkungan sosial, terlihat ada dampak yang signifikan dari pengaruh yang terjalin dari lingkungan Polres Kota Probolinggo dan Masyarakat penerima bantuan. Dari penilaian Polres terhadap penerima bantuan masyarakat terlihat sudah sangat terbantu dan diharapkan terpuaskan dengan adanya program ini begitu juga dari masyarakat yang merasakan dampak bantuan tersebut dan juga saat proses penyerahan bantuan yang mendapat respon positif dari masyarakat

dikarenakan peran Polres sebagai penyalur bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung dirasa membuat masyarakat nyaman.

Dari faktor politik pihak Polres menanggapi bahwa tidak ada bantuan dari Lembaga lain dalam proses penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang paling mendekati terkait dukungan atau kerja sama dari faktor luar adalah dari kodim, karena penyelenggara Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini ada dua, yaitu dari pihak Polres Kota Probolinggo dan pihak Kodim Kota Probolinggo agar tidak terjadi duplikasi atau data ganda dalam proses survey di masyarakat.

Dalam hal ekonomi, masyarakat sangat terbantu dengan adanya Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dimana program seperti ini merupakan salah satu alternatif dalam menekan keadaan ekonomi masyarakat yang menurun yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima dan Warung dan tanggapan masyarakat sudah baik terkait bantuan ini. Mereka memanfaatkan bantuan ini dalam usaha mereka seperti membeli bahan untuk usahanya di warung dan Sebagian bila ada sisa dibuat untuk membeli pangan bagi keluarga mereka.